

2615

16

16

ANALISA

**MASALAH - MASALAH
INTERNASIONAL**

**HUBUNGAN
EKONOMI INTERNASIONAL
DALAM
DUNIA YANG BERUBAH**

TAHUN III NO. 9

SEPTEMBER 1974



dituliskan oleh Bing P. LUKMAN menerangkan adanya interdependensi baik pada tingkat nasional maupun mondial yang telah merupakan realita untuk dihadapi dalam usaha melaksanakan pembangunan. Karangan tersebut pernah dimuatkan dalam rubrik Analisa Masalah dan Peristiwa, SUARA KARYA, 23 April 1974. Sedangkan karangan ketiga yang merupakan karangan terakhir untuk nomor penerbitan ini dituliskan oleh M. Hadi SOESASTRO dengan judul "Transfer Teknologi dalam Hubungan Internasional" pernah dimuatkan pula dalam rubrik Analisa Masalah dan Peristiwa, SUARA KARYA, 12 Maret 1974. Karangan tersebut membahas mengenai peranan teknologi sebagai salah satu alat komunikasi atau "bahasa" dalam pergaulan internasional dan masalah pokok yang terkandung di dalam usaha memindahkan teknologi dari negara maju ke negara yang sedang berkembang.

Jakarta, September 1974

C.S.I.S.

DAFTAR ISI

	<u>Hal.</u>
<u>Pengantar Penerbit</u>	i
<u>Kemerdekaan Nasional dan Saling Ketergantungan Ekonomi Bangsa-Bangsa</u>	
Daed JOESOEF	3
<u>Interdependensi dalam Rangka Pembangunan</u>	
Bing P. LUKMAN	13
<u>Transfer Teknologi dalam Hubungan Internasional</u>	
M. Hadi SOESASTRO	21

Diterbitkan oleh

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Tanah Abang III/27, Jakarta



KEMERDEKAAN NASIONAL DAN SALING KETERGANTUNGAN EKONOMI BANGSA- BANGSA

Daoed JOESOEF

Apabila kemerdekaan nasional sudah dicapai, selalu ada kehendak untuk mengisinya melalui usaha-usaha yang positif di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi lebih penting setelah ada pemikiran yang mengatakan bahwa kedaulatan bangsa yang berkaitan erat dengan kemerdekaan nasional itu hanya dapat diwujudkan secara penuh bila bangsa yang bersangkutan "kuat" di bidang ekonomi. Maka itu selalu ada kecenderungan untuk timbulnya slogan tidak hanya kemerdekaan (politik) nasional tetapi juga kemerdekaan ekonomi. Namun apakah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan ekonomi? Di dalam perkembangan ekonomi dunia yang sudah begitu kait-berkait secara kompleks, kiranya tidak dapat dikatakan lagi adanya kemerdekaan ekonomi yang absolut. Maka bila kemerdekaan ekonomi itu hanya ditanggapi secara relatif, maka soal yang lebih relevant untuk dipikirkan adalah bukannya kemerdekaan ekonomi, walaupun secara relatif, tetapi persoalan saling ketergantungan (interdependensi) ekonomi. Dan bila soal saling ketergantungan ekonomi ini dikaitkan dengan soal isi "kemakmuran" dari kemerdekaan nasional, maka perlu dibahas faktor-faktor apa yang membuat saling ketergantungan ekonomi itu tidak memberikan hasil yang sepadan bagi setiap bangsa.

Analisa berikut ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama membahas persoalan saling ketergantungan ekonomi itu sendiri dan yang kedua membahas tindakan-tindakan apa yang kiranya perlu diambil untuk membangun struktur yang sepadan guna dapat bermain dengan menguntungkan dalam saling ketergantungan tersebut.

I. Saling ketergantungan ekonomi

Ilmu ekonomi pada mulanya menganggap kemerdekaan nasional bukan merupakan obyek pemikiran ekonomi. Baginya para pelaku ekonomi maupun kesatuan-kesatuan ekonomi bukanlah bangsa, tetapi perusahaan, baik yang dilakukan oleh dan atas tanggung jawab pribadi maupun secara dan atas tanggung jawab sekumpulan pribadi-pribadi. Karenanya perdagangan, baik dalam negeri (nasional) maupun luar negeri (internasional), pada dasarnya adalah perdagangan antara perusahaan-perusahaan. Demi kelancaran perdagangan itu perusahaan-perusahaan tersebut perlu diberikan kebebasan bertindak dan bergerak.

Sebagai akibat pembaharuan yang dibawa oleh Keynes, pemikiran ekonomi mulai mengakui bahwa perdagangan (pertukaran) internasional berkembang antara ekonomi-ekonomi nasional yang mencapai atau bergerak di sekitar titik "full employment". Tetapi titik ini tidak tercapai secara spontan, melainkan melalui serangkaian kebijaksanaan pemerintah yang dengan sengaja dan sadar ditujukan ke arah penyedotan para pekerja yang masih menganggur. Jadi diakui tidak hanya perlunya campur tangan "pemerintah nasional", tetapi juga bahwa "kemerdekaan nasional" merupakan syarat yang diperlukan bagi pencapaian titik optimum ekonomi, baik nasional maupun internasional, sebab tanpa kemerdekaan itu tidak akan mungkin sesuatu penguasa mengambil kebijaksanaan yang dianggapnya dapat mengabdikan kepentingan para pelaku ekonomi yang diperintahnya. Walaupun sudah semaju demikian, pemikiran ekonomi Keynesian ini masih mengandung kekurangan, yaitu menganggap bahwa hubungan ekonomi adalah semata-mata hubungan pertukaran barang dan jasa.

Secara fundamental hubungan ekonomi selalu merupakan campuran antara pertukaran barang dan perbandingan kekuatan. Perbedaan dan ketidak-sepadanan dalam kekuatan para pelaku ekonomi yang mengadakan hubungan tetap merupakan faktor yang ikut menentukan dan ini lebih-lebih berlaku sejauh hubungan tersebut terletak di bidang perdagangan (pertukaran) internasional. Baik harga maupun kuantum yang disepakati di bidang ini selalu ditandai oleh faktor tersebut, demikian pula arus dan keseimbangan barang dan jasa yang terbentuk di situ. Dari cara melihat seperti ini kiranya dapat disimpulkan beberapa tanggapan-ekonomi mengenai "bangsa".

Suatu bangsa dalam dirinya merupakan satu kombinasi kegiatan dan aktivitas ekonomi (industri) para warganya. Isi, dimensi dan pengelompokan kegiatan tersebut ke dalam berbagai sektor (pertanian, pertambangan, perindustrian, administrasi, dan lain-lain) menentukan struktur neraca pembayarannya terhadap luar negeri, kesanggupannya mempengaruhi bangsa lain dan kemampuannya menerima ataupun menolak pengaruh dari luar.

Suatu bangsa, dipandang dari sudut lokalisasi aktivitas ekonomi para warganya, merupakan gabungan dari daerah maju dan terbelakang, kombinasi jaringan transport dan zone penggerak pembangunan. Sifat, letak dan bobot elemen-elemen itu di dalam keseluruhannya menentukan apakah aktivitas bangsa ini akan sampai melampaui batas kebangsaannya atau menerima aktivitas lanjutan dari bangsa lain.

Suatu bangsa adalah kombinasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dan finansial. Kombinasi ini merupakan dasar kemampuannya untuk mempengaruhi partnernya di bidang internasional dan atau menghadapi pengaruh yang hendak didesak oleh pihak lain kepadanya. Kemampuan ini diterapkan baik melalui pasaran modal, uang ataupun mythe uang nasionalnya.

Di pihak lain, di bidang pertukaran barang dan jasa antar-bangsa, perkembangan teknologi telah merubah "ekonomi internasional" menjadi ekonomi-dunia melalui perubahan yang ditimbulkannya dari ekonomi "faktor produksi" menjadi ekonomi "pengetahuan". Bangsa yang tidak turut ambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi-dunia tersebut berarti menulis resep bagi dekadensi ekonomi nasionalnya sendiri. Turut berkecimpung dalam ekonomi dunia berarti tidak mengasingkan dan menutup diri secara autarkis tetapi pula berarti secara sadar mengkaitkan perkembangan ekonominya pada perkembangan ekonomi bangsa lain. Ternyata sangkut-paut ekonomi bangsa-bangsa itu sudah begitu rupa sehingga dapat dikatakan bahwa kini praktis tidak ada satu bangsapun yang benar-benar berdiri sendiri, sesedikitnya tidak di semua bidang ekonomi.

Bagi pelaku ekonomi individu, besar-kecilnya hasil yang dapat ditariknya dari partisipasinya di bidang lalu-lintas pertukaran internasional, tergantung sekali dari keseluruhan struktur di mana dia tergolong; dengan perkataan lain, tergantung pada "bangsa" mana dia termasuk. Sebaliknya, struktur yang berbeda-beda dari bangsa tidak hanya menentukan perbedaan hasil pelaku ekonomi individu, tetapi juga menentukan akibat dan

pengaruh yang diterima bangsa itu sendiri dari partisipasinya dalam ekonomi dunia. Dengan perkataan lain, ekonomi dunia memberikan pengaruh yang asimetrik terhadap bangsa-bangsa sesuai dengan "struktur" yang membentuk tubuh bangsa itu sendiri. Maka itu bagi sesuatu bangsa yang ingin turut berpartisipasi di dalam ekonomi dunia, dan memang hampir tidak mungkin untuk tidak turut, sebaiknya lebih dulu meneliti dengan sempurna struktur yang membentuk dirinya. Apakah struktur yang dipunyai-nya merupakan modalitas yang kuat (ampuh) atau lemah untuk terjun di dalam ekonomi dunia.

Berdasarkan observasi dapat diajukan di sini beberapa kelemahan struktural untuk dapat masuk begitu saja ke dalam ekonomi dunia.

Pertama, koefisien perdagangan luar negeri yang tinggi sedangkan pada waktu yang bersamaan struktur produksi dan ekspor yang sangat terpusat pada sejumlah kecil komoditi. Sebaliknya jumlah kecil ekspor ini sudah merupakan bagian yang besar dari produk domestik sedangkan jumlah pasaran komoditi-nya terbatas. Bangsa yang berstruktur lemah seperti ini sulit, dalam waktu yang relatif singkat, untuk membuat diversifikasi dalam produksi dalam negerinya, demikian pula untuk membuka lebih banyak pasar terbuka untuk eksportnya.

Kedua, bangsa ini tidak mempunyai suatu industri organik. Dengan ini dimaksudkan serangkaian aparat industriil yang lengkap dan secara tepat berkaitan dengan aktivitas ekonomi di bidang lainnya, pertanian, perdagangan dan transport. Artinya, bangsa yang begini hanya mempunyai tata industri yang sporadik, tidak lengkap dan kurang sempurna kaitannya dengan lain-lain aktivitas ekonomi dalam negeri.

Ketiga, bangsa ini mempunyai kemampuan yang rendah untuk menghasilkan pekerja-otak (knowledge workers), teknisi dan lain-lain pekerja ahli. Maka itu sangat membatasi potensi perkembangan industriil yang memang sudah lemah bila dipandang dari sudut permodalan.

Keempat, impor bahan baku/penolong merupakan bagian yang besar dari keseluruhan impor dan karenanya gejolak harga di luar negeri, melalui harga bahan baku/penolong tersebut, akan tersebar ke seluruh sektor produktif dalam negeri.

Kelima, bangsa ini dengan struktur yang dipunyainya itu sangat mudah menerima akibat ketidak-seimbangan yang ditimbulkan oleh aparat moneter dan finansial bangsa lainnya.

Bila kita kini mengalihkan pandang ke arah struktur yang membentuk ekonomi nasional kita, akan segera terlihat betapa terpenuhinya ukuran-ukuran kelemahan struktural tersebut di atas. Koefisien perdagangan luar negeri kita memang cukup tinggi, yaitu sebesar kira-kira 30% sedangkan lebih dari separuh hasil ekspor berasal dari hanya empat komoditi. Bagian dari impor bahan baku/penolong dalam keseluruhan impor pada tahun 1970/1971 sampai dengan 1972/1973 adalah sebesar 35,4, 41,3 dan 39,7 persen. Berhubung kemampuan finansial dan peralatan yang terbatas maka kemampuan memproduksi tenaga ahli juga sangat terbatas, sehingga "response" tidak selalu sesuai dengan "challenge" yang timbul.

Maka dipandang dari sudut ini bangsa kita mempunyai ketidak-sepadanan di dalam struktur ekonomi, ketidak-sepadanan bila dibanding dengan semua faktor yang strategis di bidang-bidang yang menentukan dapat-tidaknya kita menarik hasil yang sepadan dari partisipasi kita di dalam ekonomi dunia. Jadi soal yang kita hadapi, seperti juga yang dihadapi oleh banyak bangsa lainnya, bukanlah ada-tidaknya "kemerdekaan ekonomi", tetapi mempunyai atau tidak mempunyai struktur ekonomi yang sepadan untuk menghadapi akibat atau pengaruh yang asimetris dari perputaran ekonomi dunia.

II. Usaha-usaha perbaikan struktur

Langkah-langkah yang kiranya perlu diambil dalam rangka pembinaan struktur yang sepadan guna dapat menarik hasil yang sepadan dari partisipasi bangsa kita dalam ekonomi dunia adalah seperti berikut:

Pada taraf makro-nasional persiapan berupa penciptaan dari apa yang oleh Dr. J. PANGLAYKIM disebut sebagai "Indonesian Incorporation", yaitu pola kerjasama yang erat antara pemerintah, birokrat, teknokrat dan bisnis sehingga kita secara nasional dapat membangun satu kesatuan kekuatan yang dalam dirinya berupa satu "kekuatan-tandingan" (counter-vailing power) berhadapan dengan MNC sebagai partner. Usaha pembentukan kekuatan-tandingan ini juga sekaligus dilakukan pada tingkat mikro-ekonomi. Hal ini merupakan keharusan mengingat struktur bisnis yang ada di negeri kita dewasa ini bersifat atomistik, dalam artian struktur di mana terdapat ribuan

perusahaan kecil ataupun menengah yang kurang diorganisir secara baik dan di mana hubungan satu dengan lainnya, walaupun hubungan itu ada, lebih bersifat *persoonlijk* daripada *zakelijk*. Walaupun perusahaan-perusahaan kecil dan menengah ini mempunyai fungsi dan peranan dalam proses pertumbuhan bisnis nasional, namun harus diakui bahwa ia sebagai keseluruhan tidak dapat dijagakan sebagai kekuatan-tandingan terhadap perusahaan-perusahaan raksasa asing. Maka itu partisipasi nasional sebagai cara untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari penanaman modal asing harus dilakukan melalui "national integrated units" di bidang industri, pengusahaan, perdagangan dan keuangan. Selain berfungsi sebagai kekuatan-tandingan terhadap perusahaan raksasa asing, national integrated units tersebut, sebagai kesatuan-kesatuan bisnis besar, dibutuhkan pula untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, terutama di bidang supply bahan baku dan pemasaran barang-jadi yang dihasilkan.

Usaha-usaha besar yang inherent dengan national integrated units tersebut sudah tentu memerlukan pembiayaan yang besar. Satu, dua atau tiga bank-bank pembangunan yang difungsikan untuk melayani ratusan bahkan ribuan aktivitas investasi tidaklah cukup dan karenanya tidak akan dapat menanggulangi perkembangan kebutuhan finansial yang relatif besar itu. Sedangkan kebutuhan finansial yang relatif rendah seperti yang terdapat dewasa ini saja sudah sukar untuk memuaskannya. Sehingga tidak mengherankan bila kebutuhan tersebut untuk sebagian terbesar dibiayai oleh perusahaan raksasa asing, yang berarti melalui "company finance", dengan konsekwensi-konsekwensi yang terang tidak menguntungkan bagi usaha pembangkitan kekuatan bisnis dan ekonomi nasional. Dengan cara begini pihak nasional yang berpartner dengan bisnis raksasa asing hanya menjadi "verlengstuk" belaka dari usaha-usaha raksasa asing, direduksi sebagai "perantara", satu kedudukan yang persis sama seperti yang berlaku dalam periode kolonial Belanda dahulu. Maka itu di samping menciptakan national integrated units, sebaiknya diciptakan pula fasilitas-fasilitas pembiayaan dalam bentuk "national financial consortium". Consortium seperti ini dapat bersifat swasta ataupun berupa kerjasama swasta dengan bank-bank pemerintah, dengan partisipasi aktif dari bank-bank devisa swasta, tetapi menarik dan mempunyai affiliiasi yang erat dengan financial consortia yang berstatus internasional, satu dan lain guna menarik dana-dana yang beredar di pasaran uang dan modal internasional.

Inilah kiranya salah satu cara kita menggunakan secara maksimum creditworthiness dunia perbankan nasional yang sebenarnya sudah ada sebagai keseluruhan di kalangan finansial internasional.

Di bidang mikro-nasional, untuk mengoreksi ketidak-sepadanan di bidang struktur industriil perlu dibina kerjasama yang lebih erat antara dunia pengetahuan, dunia riset termasuk laboratorium dan pemerintahan, khususnya di dalam pembangunan industri-industri spesialis seperti kimia, optik, dan lain-lain.

Sejauh yang mengenai kriteria investasi sebaiknya tidak hanya dibatasi pada kriteria ekonomis, seperti kenaikan GNP, kesempatan kerja, atau kriteria lainnya yang sejenis dengan itu, tetapi turut diperhitungkan pula persoalan "kebebasan" ataupun "transformasi strategis". Dengan ini dimaksudkan kesanggupan merubah tenaga dan faktor non militer untuk menjadi tenaga dan faktor yang efektif di bidang militer bila saatnya diperlukan. Misalnya, bila secara teknis memang benar bahwa pabrik pupuk relatif mudah ditransformir menjadi pabrik senjata ringan, maka pabrik pupuk perlu didirikan. Sebab pabrik seperti ini tidak hanya diperlukan hasilnya untuk sektor pertanian di masa damai, tetapi juga diperlukan peralatannya di masa perang. Dengan mengambil keputusan yang seperti ini, kita artinya mempergunakan "kemerdekaan" kita untuk mengambil keputusan-keputusan di bidang ekonomi yang akibatnya secara potensial juga mempunyai arti kelak untuk mempertahankan "kemerdekaan" itu secara fisik.

Sejauh mengenai proses pembinaan tenaga teknisi ahli memang harus diakui memerlukan biaya yang besar. Tetapi kiranya biaya ini dapat diusahakan melalui kehadiran bisnis asing yang beroperasi di negeri kita. Dengan begini artinya usaha nasional guna menarik manfaat yang maksimum dari aktivitas bisnis asing tidak boleh hanya dibatasi pada bidang ekonomi melainkan diperluas ke bidang sosial, berupa peningkatan pemberian training kepada calon tenaga-kerja, terutama drops out, ke arah penguasaan ketrampilan teknik elementer dan industrial arts. Aktivitas training seperti ini terang memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit dan untuk keperluan ini kiranya perlu didirikan suatu "Yayasan Pendidikan" yang fungsi pokoknya adalah mengusahakan agar dapat diperoleh dana yang diperlukan untuk pembiayaan tersebut secara teratur dari perusahaan-perusahaan besar asing yang beroperasi di negeri kita. Dengan perkataan "secara teratur" dimaksudkan bukan "once for all grants", tetapi grants.

yang secara periodik dan kontinu diberikan kepada Yayasan dari keuntungan tahunan yang diperoleh dari operasi bisnis perusahaan asing itu; bila perlu grants yang diambil dari keuntungan itu, dibebaskan dari pajak perusahaan. Dengan begini, melalui kehadiran Yayasan dengan misi seperti tersebut di atas, "spread effects" kehadiran bisnis asing di negeri kita menjadi lebih luas, dalam artian manfaat kehadirannya di sini tidak hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang langsung bekerja dalam lingkungannya ataupun oleh kas negara melalui pajak dan royalties yang distornya, melainkan dapat dinikmati pula oleh anggota masyarakat kita pada umumnya. Lagi pula melalui training seperti ini azas keadilan yang dituju oleh pembangunan kita dapat lebih terjamin. Keadilan di sini tercapai bukan melalui pembagian pendapatan yang lebih merata, tetapi melalui penggunaan lebih banyak oleh pembangunan sumber energi yang praktis dipunyai oleh setiap warga negara, yaitu tenaga-kerja manusia. Akhirnya, dengan meningkatkan mutu teknis tenaga-kerja dari "unskilled" menjadi sesedikitnya "rather skilled", kita tidak hanya membantu menaikkan kapasitas mencari nafkah individu, tetapi melipatgandakan modal manusia negeri kita.

Bila direnungkan lebih mendalam, sebenarnya training besar-besaran di bidang teknologi juga mempunyai arti ekonomi yang besar. Adalah satu kenyataan bahwa salah satu kekurangan yang fundamental bagi usaha pembangunan Indonesia adalah kurangnya tenaga teknisi menengah yang harus melaksanakan apa-apa yang sudah diputuskan di atas. Teknisi menengah ini, di negeri manapun, pada azasnya tidak dihasilkan dalam lingkungan pendidikan formal. Sekolah-sekolah paling jauh hanya dapat melatih ke arah penguasaan peralatan analisa, baik yang bersifat matematis maupun filosofis. Teknisi menengah ditempa dan diproduksi di pusat-pusat kegiatan produksi dan bisnis dan di negeri-negeri yang sudah maju pusat-pusat kegiatan tersebut tidak kurang jumlahnya, baik yang berupa pabrik, galangan kapal, maskapai bangunan, asuransi, perbankan, biro administrasi, dan lain-lain. Di negeri yang belum maju seperti Indonesia, justru tempat-tempat penggemblengan tenaga teknisi menengah yang seperti itu sangat kurang jumlahnya, sedangkan perkembangan pusat-pusat kegiatan produksi dan bisnis tersebut pada gilirannya sangat tergantung pada ada tidaknya tersedia tenaga teknisi menengah tadi. Alhasil terjadilah satu lingkaran yang tak berujung-pangkal. Maka untuk dapat ke luar dari lingkaran yang mencekik ekonomi ini perlu ditingkatkan aktivitas training ketrampilan teknis dan industrial

arts dan guna membiayai aktivitas yang terang menelan banyak biaya itulah dipikirkan pendirian suatu Yayasan Pendidikan. Dengan begini kita berarti memasukkan teknologi itu sendiri ke dalam masyarakat dan bukannya hanya puas dengan mengimpor hasil-hasil teknologi yang berkembang dan dikembangkan di negeri lain.

Sebenarnya masih dapat dipikirkan persiapan-persiapan nasional lainnya di bidang perundang-undangan, perburuhan, dan lain-lain, tetapi berhubung terbatasnya ruangan harian kita ini tidak dapat dibahas walaupun secara pokok-pokoknya saja.

Kesimpulan

Dengan memasukkan modal dan bisnis asing di negeri kita berarti kita secara sadar hendak berpartisipasi di dalam ekonomi dunia dan melalui partisipasi ini hendak mempercepat pembangunan ekonomi dalam rangka pengisian arti kemerdekaan bangsa. Namun hendaknya perlu disadari bahwa begitu kita memutuskan modal dan bisnis asing boleh masuk, kita sebenarnya mulai dari saat itu sudah merubah dimensi dan sifat ekonomi kita, terlepas dari soal apakah modal tersebut hanya pelengkap atau tidak, juga terlepas dari soal apakah ia boleh diinvestir hanya di sektor tertentu dan sama sekali dilarang ditanam di bidang tertentu lainnya.

Untuk dapat menghadapi perubahan dimensi dan sifat tersebut dengan baik, kiranya perlu diadakan perubahan struktur di dalam tubuh ekonomi bangsa. Perubahan struktur ini menjadi lebih penting bila diingat bahwa secara tradisional ekonomi kita sudah merupakan ekonomi ekspor dan suatu ekonomi terbuka. Jawabannya lalu bukanlah menyendiri ataupun memisah diri dari ekonomi dunia dengan preteks menjaga "kemerdekaan ekonomi" tetapi bagaimana membangun struktur yang sepadan guna dapat menarik hasil yang sepadan dari saling ketergantungan ekonomi di dalam proses pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat dan semakin kompleks.

INTERDEPENDENSI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN

Bing P. LUKMAN

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini, membuat dunia terasa makin mengecil. Komunikasi antar bangsa dan negara menjadi demikian lebih erat dan memberikan pengaruh besar kepada pola kehidupan bangsa-bangsa di dunia.

Akibat dari perkembangan tersebut, kejadian di suatu bagian dari dunia ini akan selalu mempengaruhi bagian dunia lainnya. Kejadian di Vietnam mempengaruhi situasi di Amerika, pergolakan di Timur Tengah memaksakan negara-negara Arab untuk bersatu dan menelorkan politik minyaknya yang membuat negara-negara di dunia terkacaukan rencananya, dan seterusnya.

Sebagai konsekwensi lebih lanjut, maka untuk mengurangi 'saling ketergantungannya' (interdependensi) setiap bangsa dan atau negara memerlukan peningkatan usahanya dan kerjasama yang lebih erat serta kemampuan dan keberanian mengadaptasi perubahan-perubahan yang terjadi. Pola perhubungan antar bangsa dan atau negara perlu mengalami perubahan secara horizontal maupun vertikal. Tugas di bidang diplomasi tidaklah lagi merupakan monopoli kaum diplomat, tetapi juga menjadi sebagian pekerjaan kaum pedagang, cendekiawan, wartawan, olahragawan, dan lain sebagainya. Masalah-masalah ekonomi bukanlah hanya menjadi urusan ahli-ahli ekonomi belaka, tetapi juga harus diikuti sertakan ahli-ahli sosiologi, politik, dan lain-lain di dalam usaha menyelesaikan masalahnya secara efektif.

Interdependensi mondial dan nasional

Menghadapi masalah-masalah kehidupan di dunia ini, maka pertimbangan-pertimbangan politis saja tidak mampu menyelesaikan masalah yang sebenarnya, yaitu masalah peningkatan 'kwalitas-hidup'.

Gagasan Wilson dengan pembentukan negara-negara merdeka, dalam rangka menegakkan keadilan, kebebasan, demokrasi dan perdamaian, yang berhasil mendorong terbentuknya negara-negara merdeka setelah perang dunia ke-II, menurut Prof. Dr. Bruno Fritsch¹ - pimpinan riset bidang ekonomi pada perguruan tinggi teknik di Zuerich - dinilai sebagai generator konflik-konflik internasional. Dengan makin banyaknya negara merdeka di dunia, mengakibatkan juga makin saratnya kemungkinan hubungan antar negara, sedangkan kemerdekaan yang sebenarnya, seperti ketidaktergantungan di bidang ekonomi atau mungkin juga di bidang lainnya ternyata jauh dari apa yang diharapkan, karena landasan untuk 'memerdekakan diri' dalam bidang-bidang tertentu sangat rawan.

=====

PERKEMBANGAN KEANGGOTAAN DI DALAM PBB (1945 - 1971)

=====

Tahun	Jumlah negara anggota (n)	Jumlah kemungkinan hubungan antar negara anggota $z = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$	Pendapatan rata-rata per kapita per tahun menurut penyebaran penduduk tahun 1969 (dalam US\$)
1945	51	1275	1075
1955	76	2850	990
1965	118	6903	695
1970	127	8001	390
1971 ⁺)	132	8646	95

=====

Sumber: The Europe Year Book 1972; World Bank Atlas 1971, Washington 71; OECD, DAC 1971 Review, Paris 1971.

⁺) Kedudukan Taiwan digantikan oleh RRC.

Menurut penyelidikan Prof. Dr. Bruno Fritsch, pada tahun 1969 hanya 46 negara (= 34,8% anggota PBB) yang mempunyai penghasilan rata-rata per kapita di atas US\$ 500, meskipun demikian ke 46 negara tersebut menghasilkan 87% dari seluruh produksi nasional di dunia. Ini menyebabkan ketidak seimbangan antara hak bersuara dan kekuatan perekonomian antar negara anggota, yang merupakan salah satu sebab pula mengapa PBB kurang berhasil di dalam menyelesaikan masalah-masalah perdamaian dunia.

¹ Bruno Fritsch, "Die Vierte Welt", Deutscher Taschenbuch Verlag (1973), hal. 19.

Jika pendapatan per-kapita akan dijadikan ukuran dalam menilai ketergantungan suatu negara, maka apabila diambil keadaan pada tahun 1965 dan diharapkan perbedaan pendapatan yang ada akan dihilangkan dengan segera, menurut John Pincus¹ dibutuhkan dana sebesar 1.400 milyar US dollar atau sama dengan jumlah seluruh produksi-nasional-kotor yang dihasilkan oleh negara-negara industri. Dan jika diharapkan bahwa negara-negara berkembang dalam jangka waktu 20 tahun, dihitung mulai tahun 1965, agar mencapai tingkat pendapatan negara-negara maju yang dicapai pada tahun itu, menurut Pincus dibutuhkan penyaluran dana setiap tahunnya sebesar 550 milyar US dollar; sedangkan untuk jangka waktu 50 tahun dibutuhkan transfer dana sebesar 65 milyar US dollar per tahunnya.

A.P. Thirwall membuat perhitungan lain dengan titik tolak keadaan tahun 1965 dengan asumsi bahwa sampai dengan tahun 2000 negara-negara Pasaran Bersama Eropa (PBE) dan USA hanya mengalami tingkat kenaikan pendapatan per kapita per tahun sebesar 3%, maka dibuat perhitungan atas tiga pertanyaan di bawah ini:

- a. Berapa besar kecepatan pertambahan pendapatan per kapita setiap tahunnya dari negara-negara sedang berkembang sampai dengan tahun 2000 harus ditingkatkan, agar dapat melewati tingkat pendapatan per kapita negara-negara PBE dan USA?
- b. Berapa besar kecepatan pertambahan pendapatan per kapita negara-negara sedang berkembang sampai dengan tahun 2000 harus ditingkatkan agar perbedaan 'absolut' dengan negara-negara PBE dan USA tidak berubah?
- c. Berapa lama dibutuhkan oleh setiap negara sedang berkembang, dengan memperhatikan tingkat kenaikan pendapatan negara-negara tersebut pada tahun 1965, untuk menghilangkan perbedaan pendapatan per kapita dengan negara-negara PBE dan USA?

¹ John Pincus, "External Aid: Some Consideration", dalam Development Digest, Vol. V. No. 3, October 1967.

Perhitungannya mendapatkan hasil sebagai berikut¹:

Negara	ad. a:		ad. b:		ad. c:	
	% per tahun		% per tahun		jumlah tahun	
	terhadap		terhadap		terhadap	
	PBE	USA	PBE	USA	PBE	USA
<u>Latin Amerika:</u>						
Argentina	4,7	7,3	4,3	6,8	tt	tt
Brasilia	8,5	11,0	7,4	9,8	tt	tt
Chili	5,7	8,1	5,0	7,1	30	57
<u>Afrika :</u>						
Aljazair	8,6	11,0	7,6	9,9	71	122
Ethiopia	13,5	16,2	12,2	15,0	tt	tt
Uganda	11,8	14,4	10,4	12,9	356	457
<u>Asia :</u>						
India	11,4	14,0	10,1	12,6	196	254
Pakistan	10,7	13,9	9,7	12,0	1356	1760
Indonesia	11,8	14,4	10,5	13,0	tt	tt

Sumber: A.P. Thirwall, The Development 'Gap'; National Westminster Bank, Quarterly, Review, February 1970.

tt = tak terjawab.

Apabila kita perhatikan angka-angka tersebut di atas yang didasarkan atas teori murni ekonomi dan perhitungan-perhitungan umum arithmetik maka kita akan menjadi putus-asa, apabila tidak mengadakan peninjauan secara lebih kritis dan teliti. Betapa tidak, apabila diambil sebagai contoh bahwa Pakistan membutuhkan waktu 1760 tahun lamanya untuk menyamakan keadaannya dengan USA.

Oleh karena itu, apabila seorang ahli ekonomi mendasarkan teorinya bahwa kebutuhan akan modal adalah untuk mengurangi jurang perbedaan pendapatan antara negara sedang berkembang dan negara maju, ia akan meleset sama sekali. Meskipun demikian, harus disadari pula, bahwa tanpa adanya peningkatan pendapatan per kapita, kemajuan di bidang ekonomi sama sekali tidak dimungkinkan dan itu berarti bahwa pendidikan tidak dapat dikembangkan, kemiskinan akan bertambah, kesehatan masyarakat akan rusak, industrialisasi akan macet, dan seterusnya.

¹ Bruno Fritsch, op. cit., hal. 72.

Penambahan kapital, baik melalui investasi dalam maupun luar negeri; kredit dan lain sebagainya, fungsi utamanya adalah untuk menggerakkan sumber-sumber perekonomian semaksimal mungkin (mobilisasi sumber-sumber ekonomi) agar dapat diciptakan kondisi yang lebih baik ke arah peningkatan pembangunan.

Sehingga dengan melihat kenyataan akan keterbatasan modal dalam negeri, baik berupa uang, peralatan maupun tenaga ahli (skill), usaha mempercepat gerak pembangunan tidak dapat dihindarkan dari usaha mendapatkan modal dari luar negeri.

Interdependensi mondial dan nasional pada hakekatnya mempunyai sifat saling mempengaruhi, sehingga di dalam penanggulangan kedua masalah tersebut harus digarap secara simultan dan tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Untuk menunjukkan sifat saling mempengaruhi dari interdependensi mondial dan nasional, dapat kiranya dilihat sebagai contoh krisis moneter yang sedang berlangsung dewasa ini. Dengan terjadinya inflasi, negara-negara industri harus menjual hasil produksinya dengan harga lebih tinggi. Sebaliknya negara-negara pengimpor untuk dapat membeli produksi tersebut harus menyediakan dana yang lebih besar. Apabila hasil dari ekspor negara-negara pengimpor tidak mencukupi dana yang dibutuhkan, maka sumber-sumber lain dari dalam negeri harus diperbesar, seperti dengan jalan menaikkan pajak dan lain sebagainya. Akibat dari tindakan ini, maka jelas bahwa beban kehidupan di dalam negeri akan bertambah.

Kebijaksanaan apapun yang akan diambil di dalam negeri hendaklah disadari tidaklah mungkin untuk menghilangkan sama sekali pengaruh interdependensi mondial, tetapi ia dapat dikurangi apabila interdependensi nasional dapat pula diperkecil. Interdependensi nasional dapat diperkecil apabila kesadaran nasional, kerjasama serta pengaturan yang lebih baik di semua bidang dapat dimungkinkan. Dapat dilihat sebagai contoh, bahwa betapapun majunya negara-negara seperti Amerika, Jepang maupun Jerman, tetapi pengaruh interdependensi mondial tidak juga terelakkan. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembangunan membutuhkan biaya dan tidak datang dengan sendirinya dan berapa besarnya pembangunan yang akan kita capai ditentukan pula oleh berapa besarnya biaya yang sedia kita bayarkan.

Nasionalisme dan Xenophobia

Tidak dapat disangkal lagi, bahwa salah satu faktor yang ikut menentukan dalam usaha mencapai kemerdekaan di tahun 1945 adalah semangat nasionalisme yang terdapat pada diri bangsa kita, dan diterjemahkan dalam bentuk ikut-sertanya dalam perjuangan. Tetapi bagaimanakah kemudian kelanjutannya?

Adalah sangat naif, demikian Prof. Dr. Bruno Fritsch menanggapi, apabila kemerdekaan hanya diartikan sebagai pemi-likan lagu kebangsaan, bendera nasional, pemerintahan sendiri, perwakilan-perwakilan di luar negeri, keanggotaan pada lembaga-lembaga internasional, dan lain sebagainya, karena arti kemerdekaan yang sebenarnya adalah lebih dalam daripada itu.

Arti kemerdekaan selanjutnya setelah tercapainya kemerdekaan *de jure* (proklamasi) adalah kepada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tak lain dan tak bukan adalah usaha di bidang pembangunan, agar dapat dicapai kemerdekaan *de facto* sekalipun bukan kemerdekaan absolut.

Di dalam usaha menterjemahkan rasa nasionalisme ke dalam usaha pembangunan inilah diperlukan keberanian untuk melihat kenyataan yang ada di sekitar kita, dan juga kemampuan menempatkan masalahnya pada proporsi yang wajar dan tidak dengan emosi dan illusi. Karena penempatan rasa nasionalisme yang tidak sewajarnya dapat menjurus kepada xenophobia, atau sikap 'anti-asing', terutama di dalam rangka menerima kedatangan modal dan usaha asing.

Xenophobia yang disebabkan oleh bobot nasionalisme yang berlebih-lebihan secara disadari atau tidak justru mungkin menimbulkan akibat-akibat lain yang lebih fatal yang menurut Dr. Daed Joesoef¹ dinilai sebagai menuliskan resep bagi dekadensi ekonomi nasionalnya sendiri. Hal ini berarti memperbesar interdependensi mondial maupun nasional dan menghambat tercapainya kemerdekaan *de facto* yang diharapkan. Dalam hal ini baik kiranya kita belajar dari perkembangan di negara lain; Mexico misalnya, yang pada waktu sebelum perang dunia ke-II dikenal sebagai negara yang keras menentang masuknya modal asing ternyata merubah sikap di tahun 1945. Sedangkan Soviet-Uni sekalipun merupakan satu dari negara terkuat di dunia mengharapkan kedatangan modal asing bagi usahanya mengembangkan sumber-sumber alamnya di Siberia. Bahkan RRC yang dikenal sebagai negara yang

¹ Daed Joesoef, "Ekonomi-pengetahuan dan Ekonomi-dunia", Suara Karya, 26 Desember 1973.

sangat 'tertutup' merubah sikapnya dengan tindakan ofensif di bidang internasional seperti masuknya ke dalam PBB, pembukaan perwakilan-perwakilan dagang maupun diplomatik, sampai-sampai kepada politik pingpongnya yang berkelanjutan dengan kunjungan Nixon ke RRC.

Sarana pelengkap sebagai usaha mengurangi interdependensi

Sebagaimana telah disinggung pada bab pendahuluan di depan, bahwa masalah di dunia sudah sedemikian kompleksnya, sehingga masalahnya tidak tak mungkin lagi dapat diselesaikan tanpa mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dari berbagai keahlian dan disiplin ilmiah.

Sehubungan dengan ini, perlu kiranya dibentuk suatu lembaga, badan, center ataupun apapun juga namanya, di mana di dalam membahas masalah-masalah yang ada dapat dikumpulkan pendapat-pendapat dari forum yang luas, dari pihak perencana, pengambil keputusan, pelaksana harian, orang-orang di lapangan dan lain sebagainya.

Dengan adanya sarana yang memungkinkan terjalinnya komunikasi secara langsung tersebut, maka dapat lebih diharapkan terbentuknya saling pengertian dan lebih memudahkan pelaksanaan. Misalnya dalam bidang pembangunan ekonomi, juga diikuti sertakan pemikiran-pemikiran kaum pedagang, industriawan, cendekiawan, dan lain sebagainya, sehingga dapat dihindarkan bahwa suatu keputusan yang telah diumumkan oleh pemerintah tidak harus terpaksa diralat ataupun diperbaiki kembali, karena disimpulkan dari pandangan ataupun informasi yang sempit. Kejadian-kejadian yang mungkin ada seperti tersebut di atas dapat menimbulkan ketidakpercayaan pihak-pihak tertentu terhadap pemerintah dan merugikan usaha di bidang pembangunan.

Dengan sarana semacam itu maka proses tukar menukar informasi lebih dimungkinkan dan partisipasi lebih diperbesar dan juga saling pengertian dapat lebih ditingkatkan, serta yang tidak kurang pentingnya adalah meningkatnya rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak.

Bagaimana pelaksanaan teknis lembaga tersebut sengaja tidak dipaparkan di sini, karena untuk itu diperlukan penelitian dan pertimbangan yang lebih mendalam, dan di sini hanya sekedar disajikan sebagai penyampaian gagasan.

Kesimpulan

Memperhatikan tulisan di atas dapatlah kiranya disimpulkan, bahwa interdependensi baik mondial maupun nasional tidaklah dapat dihindari, tetapi justru adanya interdependensi itulah menuntut kepada diri kita untuk melaksanakan pembangunan dan untuk ini diperlukan mobilisasi dan kerjasama yang lebih ketat untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

Selain itu, rasa nasionalisme perlu diterjemahkan dengan tepat pada tempatnya yang wajar dengan meneliti secara seksama kemampuan kita agar tidak menjadi bumerang bagi diri kita sendiri.

Sebagai penutup disampaikan gagasan pembentukan lembaga pelengkap yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan dan kelancaran informasi serta memperbesar rasa tanggung jawab sebagai bangsa, sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu.

TRANSEER TEKNOLOGI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

M. Hadi SOESASTRO

Salah satu faktor yang menentukan taraf perkembangan masyarakat dikatakan adalah tingkat teknologi yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Usaha pembangunan dalam suatu masyarakat biasanya mengassumsikan diktum ini sehingga teknologi diberi peranan penting dalam usaha-usaha pembangunan. Teknologi sudah merupakan semacam bahasa dalam pergaulan internasional dewasa ini, satu bahasa universal yang mempunyai arti yang jauh lebih hakiki daripada bahasa esperanto misalnya, sebab teknologi sebagai bahasa meletakkan pihak yang menggunakannya dalam suatu tingkatan tertentu, malahan seringkali dalam suatu derajat kemanusiaan tertentu yang dapat menembus prasangka-prasangka antar bangsa. Sebaliknya bahasa dunia buatan seperti esperanto sekedar menawarkan kemungkinan komunikasi untuk menjalin saling pengertian dan sama sekali tidak menghasilkan suatu interdependensi antar bangsa. Bahwasanya kebutuhan dan tuntutan riil dalam pergaulan internasional tidak terletak dalam suatu lingua franca yang tunggal terbukti dari kemacetan dan keengganan memperkembangkan esperanto ini; di saat sekarang juga benar-benar sudah ketinggalan jaman.

Sebagai suatu bahasa, teknologi mempunyai logikanya yang universal, yakni dalam memindahkan kerja tangan dan mungkin juga kerja otak kepada suatu peralatan mekanis atau elektronis yang membantu manusia mencapai tujuannya secara lebih efisien dan efektif. Namun demikian teknologi sebagai suatu bahasa tetap mengenal berbagai tata-bahasanya. Hal ini mungkin tidak dapat dihindarkan berhubung penterapan teknologi dalam masyarakat dunia yang pluralistis ini di satu pihak merupakan fungsi dari sistim-sistim socio-kultural yang ada dan di pihak lain ditentukan oleh kondisi lingkungan lainnya, seperti cuaca, peraturan-peraturan teknis-ekonomis, kepadatan karya dan modal, cara penggarapan dan jasa serta kondisi pasar. Antara negara-negara industri maju kosamaan tata-bahasa sudah ada sehingga lalu-lintas dan pertukaran arus teknologi bukan lagi menjadi persoalan. Sebaliknya antara negara maju dan negara yang sedang

berkembang terdapat "jurang teknologi" yang membuat masalah transfer teknologi menjadi aktual. Soalnya sudah jelas: teknologi yang dibutuhkan oleh negara-negara yang sedang berkembang untuk meningkatkan usaha pembangunannya berada di tangan negara-negara maju dan teknologi ini tidak datang dengan sendirinya, apalagi dapat segera dikuasai oleh orang setempat, semantara itu teknologi yang sudah demikian inovatif sifatnya membuat jarak antara negara maju dan negara yang sedang berkembang menjadi semakin jauh.

Ada dua masalah pokok yang inheren dalam transfer teknologi antara negara maju dengan negara yang sedang berkembang. Masalah pertama bersifat konseptual, yakni bagaimana teknologi dari suatu masyarakat dipindahkan ke masyarakat dengan sistem sosio-budaya yang lain. Transfer teknologi ini berbeda dengan transfer ilmu pengetahuan, justru karena transfer teknologi meminta diperhatikannya tata-bahasa yang berbeda-beda tersebut. Dalam suatu konferensi mengenai "Technology Transfer and Innovation" dinyatakan misalnya oleh Harvey Brooks bahwa "transfer teknologi hanya nyata apabila dijawabantahkan suatu bentuk operasi yang nyata pula". Transfer teknologi modern ke negara-negara yang sedang berkembang banyak mengalami tahanan, antara lain oleh kondisi dan sistem sosial, pola tingkah-laku manusianya, pengetahuan dan ketrampilan serta peralatan produksi tradisional yang dikenal dalam masyarakat yang menerima teknologi baru tersebut. Untuk mengatasi masalah pertama ini perlu dipilih strategi yang akan digunakan. Dalam suatu literatur (cf. Spencer D.L. dan Woroniak A., "The Transfer of Technology to Developing Countries", London 1967) ada disistematisir berbagai strategi transfer teknologi. Di situ antara lain dibedakan antara strategi imitasi, strategi adaptasi, strategi revolusioner dan strategi integral, yang satu dari lainnya dibedakan dari baik sudut tingkatan teknologi yang diantarkan -- modern, sederhana atau yang disesuaikan -- maupun sudut rencana perubahan sosio-politik dalam masyarakatnya serta bentuk-bentuk pendidikan dan latihan yang dituntut oleh masing-masing strategi tersebut. Masalah ini benar-benar merupakan masalah pilihan. Tetapi pilihan itu dalam kondisi kita tidak lagi dapat bebas sementara masalah pokok kehidupan bangsa meliputi penyerapan tenaga-kerja yang juga merupakan fungsi dari pemilihan teknik dan teknologi produksi.

Masalah kedua bersifat praktis, yakni dari mana teknologi itu dapat disalurkan, dan atas persyaratan apa. Soalnya juga sudah jelas. Bila negara kita berkecukupan modal maka kita akan dapat membeli lisensi-lisensi dari luar yang dibutuhkan dan di samping itu menggaji tenaga-tenaga ahli dari luar untuk meneruskan pengetahuan dan ketrampilan menggunakan teknologi baru. Namun keadaannya tidak seperti ini. Yang sudah terjadi dewasa ini, yakni transfer produk atau transfer hasil teknologi memang dapat dilihat sebagai bentuk yang paling primitif dari transfer teknologi itu sendiri. Tetapi bentuk serupa ini semata-mata memperbesar ketergantungan suatu negara pada negara lainnya. Terhadap gejala ini kita kenal dua reaksi, penanggulangan secara negatif yakni dengan melarang impor dan secara positif membangun industri domestik untuk mensubstitusikan kebutuhan impor. Dalam hal yang kedua dihadapi masalah transfer proses yang berkaitan dengan pembelian peralatan-peralatan dan mesin-mesin pabrik dan transfer pengetahuan. Di sini terlihat hubungan erat antara masalah konseptual dan praktis dalam transfer teknologi. Bila masalah pertama di atas akan dapat diselesaikan melalui perumusan suatu strategi yang jelas, maka kini perlu dipikirkan dari mana disadap teknologi yang dibutuhkan: melalui saluran apa, bilateral atau multilateral dan atas persyaratan apa. Antara negara dengan negara saluran bilateral tidak lagi dapat banyak membantu, sebab dalam hal ini sebagian terbesar "kedaulatan" berada di tangan perusahaan-perusahaan yang mengadakan investasi baik secara langsung ataupun sebagai joint-venture. Organisasi-organisasi internasional sejak beberapa tahun yang lalu juga telah berusaha untuk mengatur secara multilateral lalu-lintas teknologi ke negara-negara yang sedang berkembang. Hasilnya juga belum dapat kita lihat.

Bila kita tinjau keadaan dunia akan terlihat bahwa negara-negara yang sedang berkembang hanya untuk sekitar 8 % terlibat dalam transfer lisensi dunia. Di pihak lain semakin nyata bagi kita bahwa selain modal juga teknologi dunia dewasa ini berada dalam tangan perusahaan-perusahaan multinasional, sebab selain mereka mendominasi produksi internasional, pusat-pusat R & D (riset dan pengembangan) secara besar-besaran ditangani oleh perusahaan-perusahaan multinasional ini. Dengan demikian soal transfer teknologi ke negara-negara yang sedang berkembang merupakan masalah yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan multinasional dan untuk sebagian terbesar sudah lepas dari kekuasaan pemerintah ataupun negara di mana perusahaan-perusahaan raksasa itu berkantor pusat.

Pada dasarnya perusahaan-perusahaan multinasional ini tidak hanya melihat dunia pasar untuk melemparkan produksinya tetapi juga sebagai tempat produksi. Semula kecenderungan mereka menanamkan modalnya mengarah ke negara-negara maju, satu dan lain hal karena tata-bahasa dalam penggunaan teknologi sebagai bahasanya tidak lagi asing. Namun demikian menghadapi kenaikan tingkat upah buruh tanah yang sempit serta kondisi dan persyaratan ekologis terdapat "trend" yang sangat pesat bahwa perusahaan-perusahaan multinasional tersebut akan berpaling ke negara-negara yang sedang berkembang. Soalnya kini, perusahaan-perusahaan itu ada membawa modal dan teknologi yang justru kita butuhkan. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional perlu pengamanan politis dari kedua belah pihak. Tetapi ini jelas tidak akan cukup, sebab "aturan permainan" perusahaan-perusahaan multinasional dalam operasinya cukup "kejam" dalam arti bahwa posisi tawar-menawar tidak lagi mempertimbangkan kedaulatan negara, tetapi di sini keahlian mempunyai arti dan diberi arti. Bila dianggap bahwa kita tidak sanggup mempersiapkan diri untuk mampu menghadapi sumber modal dan teknologi ini melalui cara-cara tersebut di atas, maka sebaiknya segera dilupakan kebutuhan itu dan dipilihlah jalan lain yang jelas meminta pengorbanan lainnya. Kerap kali alternatif lain ini, yakni menutup diri, kelihatannya menarik tetapi dari sudut penggunaan pikiran saja sudah dapat dibayangkan bahwa akan ada akibat-akibat lainnya yang akan ditanggung. Soalnya, sekali kita melarikan diri dari masalah yang dihadapi, setiap kali kita akan melarikan diri dan tidak pernah akan berani menghadapi tantangan yang riil, apapun dalihnya: nasionalisme-kah, kepribadian dan identitas nasional dan lain-lainnya.

